BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, yaitu Gubernur Jendral Willem Daendels sebagai pembuat jalan Anyer - Panarukan, serta pembuat pos penjagaan (loJi) di Alun-alun Cimahi sekarang. Pada tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api di Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya seperti RS Dustira, rumah tahanan militer, dll. Lalu pada tahun 1935, Cimahi menjadi sebuah kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935).

Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratif (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif.

Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari

Kabupaten Bandung Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahu 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi.Kota Administratif Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fisikal, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Visi dan Misi kota cimahi :

Visi Kota Cimahi

Dengan iman, taqwa, optimis dan cerdas jadikan Cimahi kota maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan produktif.

Misi Kota Cimahi

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatakan penataan dan penegakan hukum
4. Meningkatkan infrastruktur kota
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha

Logo dan arti lambang Kota Cimahi



Gambar II.1 Logo Kota Cimahi

Arti lambang Kota Cimahi

Nama Pemkot : CIMAHI (Citra Mandiri Hidup Insani)

Bentuk Kubah : Kenyamanan dalam perlindungan

Bentuk 2 Pilar Bangun : Pembangunan bertitik pada keseimbangan (Agama & Dari Agama)

Bentuk Tatar Bunga : Lahan kehidupan strategis yang bermanfaat Bentuk

Riak Air : Dinamika SDM (POLEKSOSBUD) dan sumber kehidupan

Bentuk Irama Bukit : Sumber Daya Alam untuk kemakmuran

Bentuk Wadah atau Tempat : Kehidupan yang produktif dan efektif

Slogan : Saluyu Ngawangun Jati Mandiri

Konsep : Pembangunan Masa Depan Cimahi

Slogan

Saluyu Ngawangun Jati Mandiri , yang artinya memiliki pengertian berjalan harmonis serasi dengan selaras, bahu membahu dalam membangun citra diri yang mandiri dalam kemajuan

Makna Bentuk dan Warna

Kubah Jingga, merupakan semangat yang tiada henti untuk membangun dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kemandirian, yang didukung secara bersama-sama oleh seluruh potensi sumber daya manusia yang rendah hati dan berilmu, berakhlak dan beretika, sehat dan cerdas, kreatif dan inofatif serta produktif

Bukit Biru, yang merupakan anugerah berupa alam penuh potensi dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mendorong rasa syukur, menumbuh kembangkan ilmu selaras, menserasikan keadaan untuk kemakmuran, menciptakan pemerataan dalam keragaman yang sejahtera

Air Biru Jernih, merupakan sumber kehidupan dalam dinamika masyarakat yang multi dimensi, pengayoman dan pelindung serta membawa solusi bagi seluruh warga

Tatar dan Wadah Jingga Putih dan 2 Pilar Bangun Hijau, [redacted] merupakan bentuk keseimbangan agama dan dari agama dalam pembangunan rohani dan jasmani, menumbuh kembangkan rasa cinta, ketulusan sekaligus kebanggan terhadap nusa dan bangsa, tanah air serta ibu pertiwi dengan tatanan wilayah yang kondusif, strategis dan sinergis, memiliki struktur dan sistem yang bertumpu pada sendi politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya dan berorientasi masa depan. Tameng (Perisai), merupakan ungkapan totalitas citra bentuk rasa aman dan nyaman, serasi dalam keselarasan, dinamis dalam keharmonisan, kuat dan taat dalam kemandirian

2.2 Profil Perusahaan

Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Cimahi, dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Cimahi No.7 tahun 2008 tentang sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi. Dalam Lingkup Organisasi Perangkat Daerah, bagian Humas berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan.

Bagian humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Humas (kabag) dengan jabatan golongan eselon 3A. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah sesuai permendagri No. 59 tahun 2007, Kabag Humas bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran.

Peranan institusi (bagian) humas dan protokol dalam organisasi merupakan hal penting untuk menjalankan fungsi kehumasan dan komunikasi organisasi, disamping sebagai sarana pengembangan pencapaian profesionalitas aparatur.

Untuk dapat tampil dengan kredibel, tentu bagian humas dan protokol memerlukan dukungan SDM yang profesional, yang mampu mengelola informasi dengan baik, mampu berinteraksi secara lugas, dengan dan melakukan berbagai strategi komunikasi yang efektif dan tepat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk melaksanakan manajemen informasi dan komunikasi, serta keprotokolan

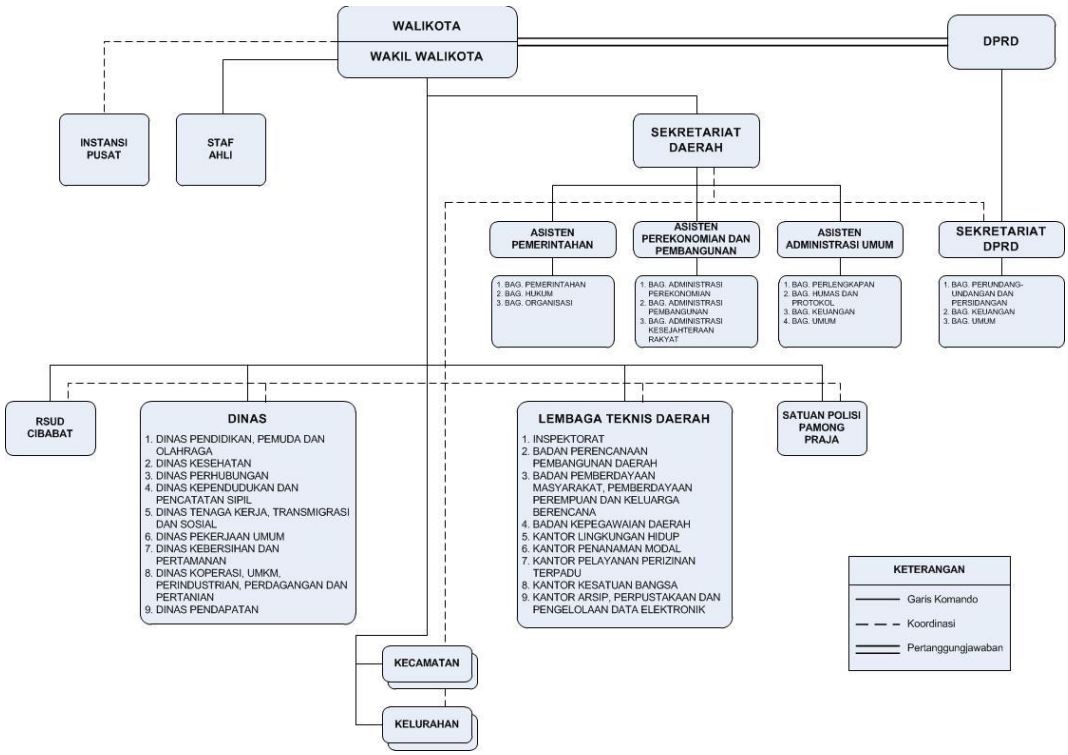
adalah tenaga teknis dan tenaga strategis yang memiliki kemampuan dibidang tersebut dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan.

Terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik dalam mendukung Kota Cimahi yang maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan produktif adalah visi dari Humas Pemerintah Kota Cimahi.

Divisi Humas Pemerintah Kota Cimahi berusaha untuk menjembatani antar pihak, baik eksternal maupun internal agar visi, misi dan tujuan yang dimaksud tercapai dan terintergrasi dengan baik.

Organisasi Pemerintah Kota Cimahi

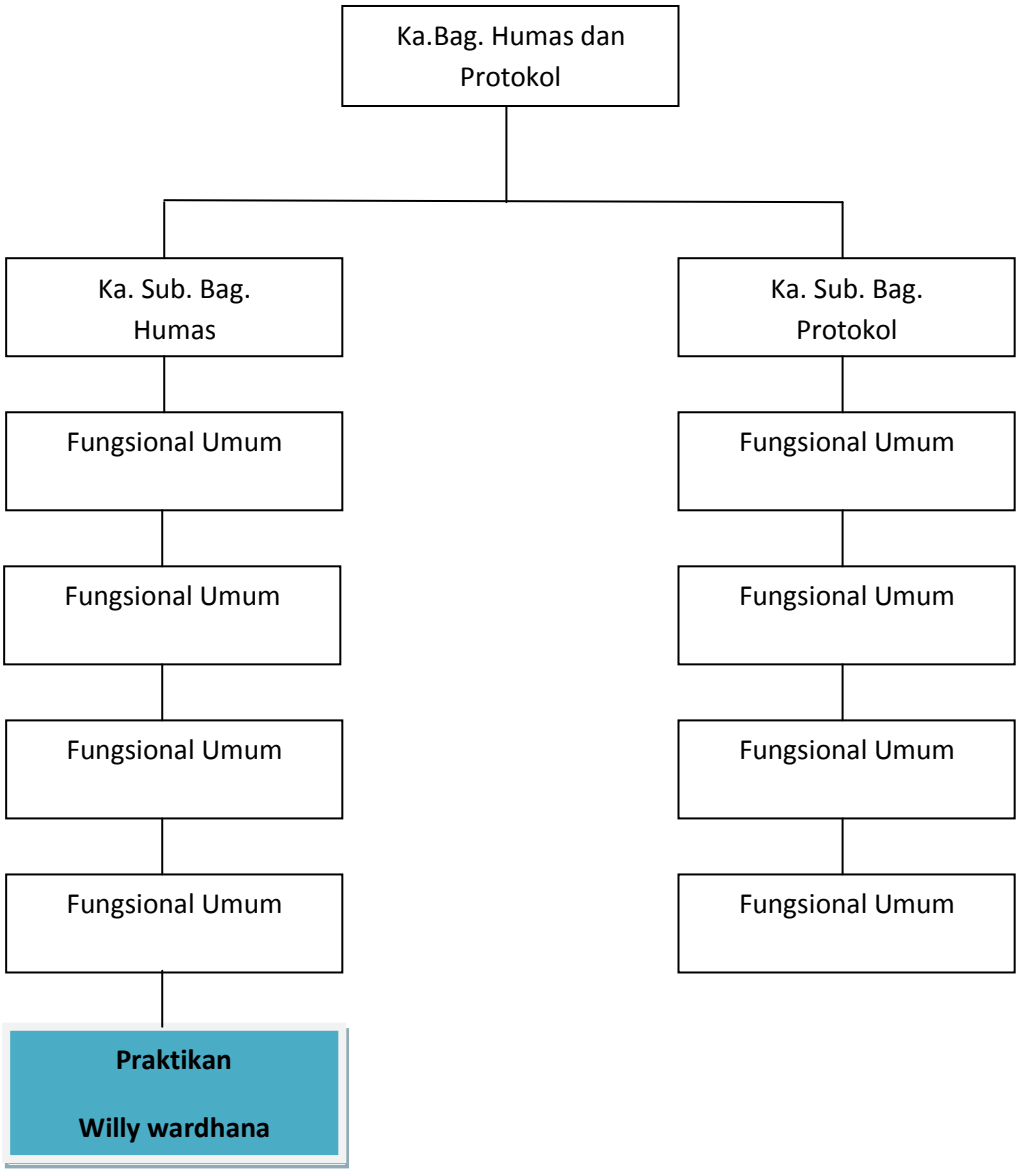
Pemerintah Kota Cimahi memiliki struktur perusahaan yang terdiri dari beberapa bagian. Adapun struktur dari Pemerintah Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Tabe lII.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cimahi

Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Cimahi

Karena bagian Humas dan Protokol di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sudah disetujui keberadaannya, maka bagian Humas dan Protokol ini memiliki struktur komando sendiri yakni sebagai berikut :



Tabel III. 2 Struktur Bagian Humas Kota Cimahi

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa struktur organisasi Bagian Humas Pemerintah Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Humas (Ka. Sub. Bag. Humas). Dalam melakukan tugasnya, Ka. Sub. Bag. Humas dibantu oleh para fungsional umum.

Tugas pokok divisi Humas dan Protokol Sekertariat Daerah adalah merencanakan oprasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang Humas dan Protokol. Selanjutnya, guna melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Humas dan Protokol memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang Humas dan Protokol
2. Penyelenggaraan tugas bidang Humas dan Protokol yang meliputi Humas dan Protokol
3. Pengaturan program dan kegiatan organisasi yang meliputi Humas
4. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Humas.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Humas dan Protokol menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kota
2. Mewujudkan pelayanan informasi kehumasan kepada internal dan eksternal publik yang akurat dan benar
3. Mewujudkan penguasaa teknologi informasi dan komunikasi
4. Mewujudkan pelayanan kehumasan yang efektif dan terpadu